



PETISI SUTARDJO: WADAH PEMAHAMAN KESADARAN NASIONAL BAGI PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Ananda Putri Rizki

anandaputririzki03@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Informasi Artikel

Kata Kunci :

Petisi Sutardjo, Kesadaran Nasional, Pembelajaran Sejarah, Peserta Didik

Keywords:

Sutardjo's Petition, National Awareness, History Learning, Students



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright ©2023 by Author.

Published by Universitas Jambi

ABSTRAK

Petisi Sutardjo merupakan sebuah Petisi yang diajukan oleh DR. Sutardjo Kartohadikusumo dalam sidang Volksraad di Batavia pada 15 Juli 1936. Petisi tersebut berisi mengenai permohonan kepada pemerintah Belanda agar Hindia Belanda mendapatkan hak otonomi untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui peranan petisi terhadap pemahaman kesadaran nasional peserta didik dan pembelajaran sejarah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur seperti jurnal dan buku yang relevan. Petisi Sutardjo terhadap pemahaman kesadaran nasional peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Peneliti melakukan berbagai langkah penelitian seperti (1) Pengumpulan data, (2) Analisis), (3) interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petisi Sutardjo memiliki dampak yang besar bagi tumbuhnya kesadaran nasional bagi generasi muda. Melalui pembelajaran sejarah, petisi

Sutardjo dapat menjadi wadah pemahaman Peserta Didik terhadap Penumbuhan Kesadaran Nasional. Pemahaman tersebut dapat dilakukan dengan cara mengkaji dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada sosok Sutardjo seperti sikap nasionalis, peduli sosial, optimis, dan cinta tanah air.

ABSTRACT

The Sutardjo's petition is a petition filed by DR. Sutardjo Kartohadikusumo in court People's Council in Batavia on 15 July 1936. The petition contained a request to the Dutch government so that the Dutch East Indies would have the right to autonomy to run the government independently. The purpose of this research was to find out the role of petitions in understanding students' national awareness and learning history. This study uses a descriptive analysis method with a qualitative approach. Data collection techniques in this study were through literature studies from various literature such as relevant journals and books. Sutardjo's petition on students' understanding of national awareness in history learning. Researchers carry out various research steps such as (1) data collection, (2) analysis), (3) interpretation. The results of the study show that Sutardjo's petition has a major impact on the growth of national awareness for the younger generation. Through learning history, Sutardjo's petition can become a forum for students' understanding of growing national awareness. This understanding can be done by studying and implementing the values that exist in the figure of Sutardjo such as nationalist attitudes, social care, optimism, and love for the country.

PENDAHULUAN

Masa pergerakan nasional perjalanan sejarah Indonesia, menjadi masa yang berperan besar dalam terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pada masa itu, perjuangan rakyat mulai berorientasi pada kepentingan nasional. Perjuangan pergerakan nasional Indonesia bertujuan untuk mencapai Indonesia

merdeka sehingga pada masa ini terjadi beberapa peristiwa sejarah yang penting yaitu kebangkitan nasional yang diawali oleh lahirnya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 (Tuahunse, 2009:3). Kebangkitan nasional ialah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan republik Indonesia (Printina, 2019: 1). Sehingga, tidak heran di masa itu, banyak organisasi atau gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Bumiputera untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Kebangkitan nasional tersebut, tidak lepas dari diterapkannya politik etis atau politik balas budi pada tahun 1901-1942. Politik Etis dengan program edukasinya membuat pemikiran masyarakat Bumiputera menjadi semakin terbuka dan kritis terhadap permasalahan penjajahan yang terjadi di Hindia Belanda. Dengan adanya pendidikan, melahirkan banyaknya tokoh pergerakan dan tokoh nasional yang menjadi penggagas kemerdekaan Indonesia, salah satunya DR. Sutardjo Kartohadikusumo. DR. Sutardjo Kartohadikusumo sebagai tokoh nasional memiliki peran yang besar dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Sutardjo melalui Petisinya yang dikenal Petisi Sutardjo memberikan angin segar terhadap kebangkitan nasional Indonesia.

Petisi yang diajukan pada 15 Juli 1936 ini menimbulkan dampak terhadap munculnya sikap nasionalisme. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap nasionalisme perlu ditumbuhkan dalam jiwa setiap warganya khususnya kepada generasi muda penerus bangsa. Nasionalisme yang ada dalam jiwa generasi muda, dapat menjadi faktor pendorong kuatnya kedaulatan suatu negara (Alfaqi, 2016: 209). Oleh karena pentingnya, sikap nasionalisme maka perlu adanya pemahaman mengenai sikap nasionalisme. maka diperlukan wadah untuk menumbuhkan sikap nasionalisme kepada generasi muda, salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi sarana yang tepat untuk menumbuhkan atau membangkitkan kesadaran nasional atau sikap nasionalisme generasi muda. Melalui pendidikan, kesadaran nasional ditumbuhkan melalui mata pelajaran yang ada di sekolah yaitu pembelajaran sejarah.

Pembelajaran sejarah memiliki peran yang penting dalam pembentukan sikap, watak, karakter unggul generasi penerusnya sebagai suatu bangsa memiliki rasa kebangsaan, intelektual, menghargai perjuangan bangsanya dan rasa nasionalisme (Juliyati, 2021). Oleh sebab itu, pembelajaran sejarah menjadi wadah pemahaman kesadaran nasional peserta didik. Dalam pembelajaran sejarah, peserta didik diberikan pemahaman mengenai pentingnya mempelajari sejarah. Oleh sebab itu, guru perlu mengembangkan pembelajaran sejarah menjadi pembelajaran yang bermakna sehingga mampu menciptakan peserta didik berkarakter unggul melalui nilai-nilai kehidupan dan kemausiaan dari peristiwa sejarah yang diajarkan pada pembelajaran sejarah (Asmara, 2019:107-108). Apalagi seiring berkembangnya zaman banyak perubahan terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Sikap nasionalisme dalam jiwa generasi muda semakin memudar. Oleh karena itu, perlu

dilakukan upaya untuk penanaman kesadaran nasional melalui pembelajaran sejarah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pembaca bahwa melalui sebuah petisi yang dicetuskan oleh DR. Sutardjo Kartohadikusumo kesadaran nasional dapat tumbuh dalam jiwa peserta didik. Penelitian ini menjelaskan relevansi antara Petisi Sutardjo dengan tumbuhnya kesadaran nasional pada masa lampau dan urgensinya materi petisi Sutardjo untuk diajarkan dalam pembelajaran sejarah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan sehingga perlu dilakukan analisis dan penjabaran yang mendalam (Nugrahani, 2014:25). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah penelitian antara lain (1) Pengumpulan data, (2) Analisis), (3) interpretasi. Tahap pertama yaitu pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan mencari literatur seperti buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan topik penelitian yaitu mengenai Petisi Sutardjo tahun 1936, Kesadaran nasional, dan pembelajaran sejarah. Setelah peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur, kemudian tahap kedua yaitu tahapan analisis data. Pada tahapan analisis data, peneliti menganalisis dan mengolah data yang sesuai dengan tema penelitian yaitu Petisi Sutarjo sebagai wadah pemahaman kesadaran nasional para peserta didik. Peneliti dalam tahapan ini, meneliti keterkaitan Petisi Sutardjo dengan penumbuhan kesadaran nasional peserta didik dan informasi apa saja yang akan disampaikan dalam hasil penelitian ini. Tahapan terakhir yaitu interpretasi. Pada tahapan ini, peneliti menyimpulkan mengenai hasil penelitian yang telah melewati proses analisis yang mendalam yang kemudian dideskripsikan. Tahapan ini, peneliti menyampaikan generalisasi informasi terkait topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DR. Sutardjo Kartohadikusumo merupakan salah satu tokoh nasional asal Blora yang berjasa pada masa pergerakan Indonesia. Pada tahun 1931-1942, Sutarjo bergabung sebagai anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) Hindia Belanda. Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen, Sutardjo banyak mengemukakan aspirasi rakyat Hindia Belanda mengenai ketidakadilan yang dialaminya. Sutardjo, memiliki keinginan agar Hindia Belanda dapat terbebas dari kebijakan pemerintah kolonial yang sewenang-wenang. Pada tahun 1933 Pemerintah kolonial Belanda melarang pegawai negeri untuk bergabung menjadi anggota PNI (Partai Nasional

Indonesia) dan Partindo, kemudian melakukan penangkapan terhadap Ir, Soekarno tanpa tuduhan pelanggaran hukum dan kedua partai itu diberikan pembatas hak untuk ikut bersidang. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1934, pemerintah kolonial banyak menumpas berbagai kegiatan politik seperti rapat pemuda dan wanita serta penangkapan beberapa tokoh pergerakan, misalnya Moh. Hatta, Sutan Syahrir, Maskun, Burhanuddin, dan lain sebagainya.

Berbagai tindakan tersebut membuat kegiatan pergerakan di Indonesia menjadi terhenti, karena banyaknya tokoh pergerakan yang ditangkap dan partainya dihentikan dan membubarkan diri. Hal tersebut membuat semangat pergerakan masyarakat Hindia Belanda menjadi menurun. Semangat pergerakan di kalangan masyarakat menjadi semakin menurun. Menanggapi permasalahan tersebut, Sutardjo selaku anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) Hindia Belanda melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain dengan mengadakan pertemuan dengan pembesar Belanda di luar *Volksraad* (Mr. WG, Peekema, *Direktur Algemeen Zaken*). meminta bantuan terhadap *Volksraad* sebagai bentuk tuntutan sebesar f 25.0000.000 (dua puluh lima juta gulden) untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, kedua upaya tersebut tidak memberikan perubahan karena pemerintah kolonial Belanda semakin bertindak sewenang-wenang sehingga membuat Sutardjo memberikan kecaman terhadap Belanda (Sutrisno, 1982:360).

Petisi Sutardjo Tahun 1936

Pada tanggal 15 Juli 1936, dalam sidang *Volksraad* Sutardjo mengajukan sebuah petisi yang ditunjukkan kepada *Volksraad*. Petisi tersebut ditandatangani oleh anggota *Volksraad*, antara lain Ratu Langie, Kasimo, Datoek Toemenggoeng, Ko Kwat Tiong, dan Alatas. Petisi Sutardjo berisi mengenai permohonan Sutardjo pada pemerintah Belanda agar mengadakan sidang permusyawaratan bersama dengan wakil-wakil Nederland dan Hindia Belanda untuk memberikan otonomi pada Masyarakat Hindia Belanda atau Bumiputera agar bisa menjalankan pemerintahannya sendiri selama 10 tahun yang berlandaskan undang-undang mengenai batas-batas wilayah pasal 1 *Grondwet*. Dalam pasal 1 *Grondwet* (1922), menjelaskan bahwa Indonesia, Suriname dan Curacao mempunyai kedudukan yang sama atas hak hidup melalui bakat dan kekuatannya sendiri-sendiri, sebab kedudukan *Nederlandsch Indie* atau Hindia Belanda, Suriname, Curacao berubah dari koloni menjadi negara yang berdiri sendiri.

Dalam sidang *Volksraad*, petisi Sutardjo diperdebatkan agar menghasilkan kesepakatan untuk ditindaklanjuti. Untuk dihasilkan sebuah kesepakatan, pemungutan suara pun dan hasil menunjukkan bahwa terdapat 26 dari 46 suara menyatakan setuju terhadap petisi yang diajukan oleh Sutardjo tersebut. Dari pihak dalam *Volksraad*, golongan yang menyetujui tetapi dengan persyaratan tertentu, diwakili oleh Mob. Husni Thamrin. Di samping itu, suara-suara yang menyetujui juga berasal dari luar *Volksraad*, yaitu dari Persatuan Para Bupati (Regenten Bond) Sedlo Mulio diwakili oleh RAA Herman Kartowisastro dan para mahasiswa Indonesia oleh

para Mahasiswa Indonesia di Nederland dan RM Notosuroto bangsawan dari keluarga Paku Alaman yang sedang belajar di Nederland. Sedangkan yang menolak ialah Sukarjo Wiryopranoto. Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, disepakati bahwa Ketua *Volksraad* harus menindaklanjuti petisi tersebut kepada Gubernur Jenderal, Menteri Koloni, Ratu Belanda dan Parlemen (Marihandono, dkk., 2016: 105).

Setelah disetujuinya Petisi Sutardjo dalam sidang *Volksraad*, ada surat kabar Belanda yang mengejek Petisi Sutarjo ini dengan kata-kata sinis. Namun, pers Belanda tidak kalah dengan surat kabar Indonesia yang banyak menyetujui petisi itu, antara lain surat kabar Pemandangan, Cahaya Timur, Pelita Andalas, Pewarta Deli, majalah Katolik, Suara Katolik. dan lain-lain. Persuratkabaran Indonesia, secara luas memanfaatkan pers untuk menyampaikan respons positif terhadap diajukannya Petisi Sutardjo yang mana dapat membungkam pers Belanda sekaligus memperkokoh semangat perjuangan masyarakat Bumiputera (Hindia Belanda) meraih kemerdekaan bangsanya.

Pada 1 Oktober 1936, petisi tersebut diserahkan kepada Menteri Koloni, Ratu Belanda, dan Parlemen Belanda. Setelah dua tahun petisi tersebut diserahkan, Berdasarkan Surat Keputusan Ratu nomor 40 tanggal 16 November 1938 dikeluarkanlah surat penolakan terhadap Petisi yang diajukan Sutardjo. Surat keputusan tersebut, dibacakan pada 29 November 1938 dalam sidang *Volksraad* di Batavia. Penolakan Petisi Sutardjo oleh Ratu Wilhelmina (Ratu Belanda). karena Masyarakat Hindia Belanda pada masa itu, dinilai belum mampu menjalankan pemerintahannya secara mandiri (Marihandono, dkk., 2016:106).

Dampak Penolakan Petisi Sutardjo

Pasca Petisi yang diajukan Sutardjo ditolak oleh Pemerintah Belanda, Sutardjo mengungkapkan bahwa keputusan yang diambil oleh Pemerintah Belanda dalam sidang *Staten Generaal* adalah suatu keputusan yang kurang tepat. Kemudian, sebagai bentuk tindak lanjut pasca penolakan Sutardjo dibentuklah GAPI (Gabungan Politik Indonesia) sebagai bentuk perealisasi keinginan masyarakat untuk membentuk Nasional Konsentrasi oleh tokoh pergerakan. GAPI (Gerakan Politik Indonesia) terbentuk karena tokoh pergerakan berpandangan bahwa kedudukan *Volksraad* semakin lemah. Masyarakat Bumiputera, tidak bisa mengandalkan *Volksraad* sebagai jalur yang ditempuh untuk memperoleh kemerdekaan sebagai suatu bangsa. Perlu adanya Nasional Konsentrasi yang mempunyai kekuasaan untuk membentuk parlemen nasional agar masyarakat Bumiputera dapat bergerak secara luas dan bebas dalam perjuangan pergerakan nasional.

Organisasi GAPI (Gabungan Politik Indonesia) dibentuk pada tanggal 21 Mei 1939 oleh Muhammad Husni Thamrin. Organisasi ini adalah gabungan dari Parindra, Gerindo, Partai Islam Indonesia, Pasundan, dan PSII. Selain organisasi GAPI, pada bulan Juli 1939 dibentuk juga badan persatuan yang dinamakan GNI (Gerakan Nasional Indonesia) yang diprakarsai oleh Moh. Yamin, Rasjid, dan Tadjoeeddin Noer.

Organisasi GNI (Gerakan Nasional Indonesia) (Yolanda, dkk., 2022:11). GAPI (Gabungan Politik Indonesia) dengan semboyannya “Indonesia Berparlemen” secara jelas menuntut pembentukan parlemen yang lebih berpihak kepada masyarakat Bumiputera. *Volksraad* sebagai parlemen pemerintah kolonial tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan rakyat, sehingga dianggap parlemen “semu” yang tidak berdampak bagi kemajuan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Bumiputera (Sutrisno, 1982:42). Dengan demikian, dibentuknya Organisasi GAPI (Gabungan Politik Indonesia) menjadi Gerakan yang nyata masyarakat Bumiputera melalui organisasi politiknya agar masalah yang terjadi pada rakyat Bumiputera dapat teratasi. Selain melalui gerakan politiknya, masyarakat Bumiputera juga membentuk Organisasi GNI (Gerakan Nasional Indonesia) sebagai wadah penyambung aspirasi rakyat di wilayah daerah. Organisasi GPI dan GNI menjadi bukti nyata dampak dari adanya penolakan terhadap petisi Sutardjo, semangat nasionalisme menjadi semakin tumbuh dalam jiwa masyarakat Bumiputera pada masa itu. Masyarakat Bumiputera menjadi semakin gencar dalam menyuarakan gagasan mengenai kemerdekaan Indonesia.

Kesadaran Nasional dalam Pembelajaran Sejarah melalui Petisi Sutardjo

Penanaman kesadaran nasional menjadi hal yang esensial untuk ditanamkan dalam proses pembelajaran sejarah. Kesadaran nasional dapat diartikan sebagai terbentuknya identitas nasional, perasaan atau ikatan yang kuat sebagai suatu bangsa. Hal tersebut, sejalan dengan tujuan pembelajaran sejarah di sekolah yaitu mendidik peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa agar berkarakter nasionalis dan berbudi luhur yang dipelajari melalui peristiwa sejarah pada masa lampau (Saputra, 2020:10).

Pada masa pergerakan nasional, kesadaran nasional mulai muncul dalam jiwa pemuda-pemuda pada masa lampau. Munculnya kesadaran nasional tersebut, terjadi ketika dalam jiwa pemuda-pemuda saat itu muncul banyak keresahan sosial yang dialami masyarakat Hindia Belanda atau Bumiputra pada masa itu. Masyarakat Bumiputera, khususnya masyarakat dari golongan biasa (non priyayi) mengalami perlakuan diskriminasi dari pemerintah kolonial, misalnya dalam dunia pendidikan masyarakat Bumiputera banyak yang tidak dapat merasakan dunia sekolah karena kesempatan sekolah dan berpendidikan tinggi hanya berlaku untuk masyarakat golongan priyayi atau kaum elit Jawa. Selain itu, dalam lingkungan kerajaan pemerintah kolonial memberlakukan kebijakan yang membuat kekuasaan kerajaan menjadi semakin terbatas, seperti dilarangnya kerajaan melakukan tradisi kerajaan tertentu.

Perlakuan diskriminasi tersebut, kemudian menjadi faktor pendorong bagi pemuda-pemuda pada masa pergerakan untuk bangkit dan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan, salah satunya DR. Sutardjo Kartohadikusumo melalui kedudukannya sebagai keanggotaan dari *Volksraad* (Dewan Rakyat) Hindia Belanda. Dalam perjuangannya membebaskan Hindia Belanda dari belenggu penjajahan

kolonial Belanda, Sutardjo melakukan berbagai usaha termasuk mengajukan petisi dalam sidang *Volksraad*. Melalui petisi Sutardjo, peserta didik dalam mengambil nilai-nilai luhur dari sosok Sutardjo sebagai anggota parlemen yang memiliki karakter cinta tanah air, sikap peduli sosial yang tinggi, optimis, dan nasionalis. Karakter cinta tanah air dan peduli sosial yang tinggi pada sosok Sutardjo dapat dilihat dari peran serta Sutardjo dalam jabatannya sebagai *Volksraad* (Dewan Rakyat). Sutardjo selalu mementingkan kepentingan rakyat Hindia Belanda dengan menyuarakannya permasalahan yang dialami oleh rakyat Bumiputera dalam sidang *Volksraad*. Sutardjo mengupayakan segala cara agar masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi pada kehidupan rakyat Bumiputera dapat terasi dan rakyat mendapatkan hak atas kehidupan atas tanah kelahirannya dengan adil. Hingga diajukannya Petisi Sutardjo sebagai jalan keluar agar Indonesia dapat merdeka dari pemerintah kolonial Belanda.

Dalam rapat *Volksraad* 7 Agustus 1931, Soetardjo menyampaikan permasalahan yang ada di masyarakat terkait kemunduran pembatik di kota Lasem. Pada tahun 1930, Gonggrijp menjabat sebagai kontrolir telah mengetahui bahwa kondisi buruk yang terjadi di Lasem tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut, berdasarkan tinjauan tentang kondisi ekonomi sebagian besar wilayah Hindia Belanda yang meyakinkan bahwa di Lasem kondisinya sangat buruk dan segala upaya dilakukan oleh pemerintah selama 40 tahun tidak mengubah kondisi buruk yang terjadi di Lasem. Soetardjo mengusulkan agar segera dilakukan perbaikan kondisi di wilayah Lasem dengan melakukan pemberdayaan secara maksimal terhadap aparat baik aparat pemerintah bumiputera maupun Eropa (Marihandono, 2016:19-24). Hal tersebut menjadi contoh nyata upaya Sutardjo dalam menciptakan kehidupan yang adil di Hindia Belanda. Sutardjo mengusulkan agar terwujudnya pemerintahan yang cakap dalam mengatasi permasalahan ekonomi rakyat di Hindia Belanda. Sutardjo ingin aparat pemerintah memiliki sikap empati yang tinggi terhadap keresahan yang terjadi di kehidupan masyarakat di Hindia Belanda.

Kesadaran nasional atau sikap nasionalisme juga tercermin dari sosok seorang Sutardjo dan perjuangannya dalam Petisi tahun 1936. Petisi Sutardjo berisi refleksi mengenai perjuangan untuk mencapai kemerdekaan menjadi suatu bangsa dan negara yang dapat menjalankan pemerintahan dan kehidupannya secara mandiri dan independen berdasarkan sistem konstitusi sendiri. Meskipun, kini Indonesia sudah merdeka, sikap nasionalisme masih dapat diimplementasikan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Maulana, 2021:28). Sehingga peristiwa Petisi Sutardjo tahun 1936 menjadi materi yang penting untuk disampaikan kepada peserta didik agar kesadaran nasional dalam tumbuh dalam jiwa peserta didik sebagai generasi muda penerus bangsa.

Kemerdekaan Indonesia yang dapat dirasakan masa kini adalah hasil perjuangan masyarakat Indonesia pada masa lampau, termasuk Sutardjo. Sutardjo memiliki peranan yang besar terhadap pergerakan dan kebangkitan nasional Indonesia. Kiprahnya sebagai *Volksraad* (Dewan Rakyat) Hindia Belanda dapat menjadi pemahaman bagi peserta didik mengenai tugas yang harus dijalankan

sebagai seorang warga negara sekaligus wakil rakyat dalam lembaga legislatif yang sangat mengutamakan kepentingan masyarakat dan memiliki sikap nasionalisme serta sikap kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang mana, pada era modern saat ini, sangat jarang ditemukan sosok wakil rakyat yang memiliki karakter seperti Sutardjo. Sosok wakil rakyat yang dalam kehidupannya mengabdikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat Hindia Belanda. Berdasarkan penjelasan tersebut, materi sejarah mengenai Petisi Sutardjo tahun 1936 sangat penting untuk disampaikan kepada peserta didik melalui pembelajaran sejarah di sekolah. Dari peristiwa sejarah petisi Sutardjo tahun 1936 dapat diambil nilai-nilai kehidupan seperti sikap nasionalisme, optimis, dan mementingkan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi dalam kedudukan Sutardjo sebagai dewan rakyat atau *Volksraad*.

KESIMPULAN

DR. Sutardjo Kartohadikusumo merupakan salah satu tokoh nasional asal Blora yang berjasa pada masa pergerakan Indonesia. Pada tahun 1931-1942, Sutardjo bergabung sebagai anggota *Volksraad* (Dewan Rakyat) Hindia Belanda. Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota parlemen, Sutardjo banyak mengemukakan aspirasi rakyat Hindia Belanda mengenai ketidakadilan yang dialaminya. Pada tanggal 15 Juli 1936, dalam sidang *Volksraad* Sutardjo mengajukan sebuah petisi yang ditunjukkan kepada *Volksraad*. Petisi tersebut, berisi mengenai permohonan Sutardjo kepada pemerintah Belanda agar Hindia Belanda diberikan otonomi untuk dapat menjalankan pemerintahannya sendiri selama 10 tahun.

Dalam perjalanannya, Petisi Sutardjo mendapat reaksi kontra dari beberapa tokoh pergerakan yang menyebutkan bahwa dengan diajukannya petisi tersebut secara tidak langsung masyarakat Bumiputera atau Hindia Belanda meminta kemerdekaan wilayahnya pada pemerintah kolonial. Padahal, kemerdekaan Indonesia harus diraih oleh perjuangan Indonesia sendiri tanpa pemberian dari negara penjajah. Selain itu, Petisi Sutardjo juga menjadi salah satu peristiwa sejarah yang penting dalam perjalanan sejarah pergerakan nasional Indonesia. Melalui Petisi Sutardjo, generasi muda dapat mengenal sosok DR. Sutardjo Kartohadikusumo yang dapat menjadi sosok yang dapat diteladani sebagai seorang warga negara sekaligus tokoh parlemen, sebab Sutardjo merupakan seorang yang menjabat sebagai *Volksraad* (Dewan Rakyat). Sebagai sosok Dewan rakyat, Sutardjo merupakan sosok yang memiliki sikap yang optimis, tanggung jawab dengan jabatannya, mengutamakan kepentingan rakyat, dan sebagainya. Materi sejarah mengenai petisi Sutardjo perlu diajarkan pada pembelajaran sejarah guna menanamkan pemahaman kesadaran nasional bagi peserta didik, karena melalui materi tersebut peserta didik dapat mengetahui awal mula dari perjuangan rakyat Bumiputera dalam menyuarkan kemerdekaan Indonesia.

Pada penelitian ini, masih terdapat kekurangan mengenai model pembelajaran yang efektif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah

materi sejarah petisi Sutardjo. Oleh karena itu, peneliti memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya agar lebih sempurna dan spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaqi, M. Z. (2016). Melihat sejarah nasionalisme Indonesia untuk memupuk sikap kebangsaan generasi muda. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 13(2), Hal 209.
- Asmara, Y. (2019). *Pembelajaran Sejarah Menjadi Bermakna dengan Pendekatan Kontektual*. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 2(2), pp.107-108.
- Juliyati, E. D. (2021). Peranan Pembelajaran Sejarah Dalam Penanaman Nilai Karakter Nasionalisme.
- Marihandono, D., Tangkilisan, Y. B., & Perbawa, J. (2016). *Soetardjo Kartohadikoesoemo*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, Kemdikbud RI. 19-106.
- Maulana, A. (2021). Peranan Pendidikan Sejarah Untuk Membangkitkan Jiwa Berbangsa Dan Bernegara. *PROSIDING PEKAN SEJARAH 2020*, 1(1), 24-30.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books. Hal 25.
- Printina, B. I. (2019). QUOTES BUDI UTOMO SEBAGAI SARANA PENGUAT KESADARAN NASIONAL. *Jurnal Artefak*, 6(1), 1-6.
- Saputra, A. D. (2020). Model Pembelajaran Sejarah Nasional Berbasis E-Learning Dalam Membentuk Karakter Nasionalis. Hal 10.
- Sutrisno. (1982). *Dr. Sutarjo Kartohadikusumo : hasil karya dan pengabdianannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Tuahunse, T. (2009). Hubungan antara pemahaman sejarah pergerakan nasional Indonesia dengan sikap terhadap bela negara. *Jurnal Kependidikan*, 39(1), 1-10.
- Yolanda, M., & Hartati, U. (2022). PERKEMBANGAN GABUNGAN POLITIK INDONESIA (GAPI) PADA MASA PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA 1939-1942. *SWARNADWIPA*, 5(1), 10-16.